

TUGAS AKHIR
ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI KEUANGAN
DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL

DINAS PARIWISATA

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Ahli Madya Program

Studi Diploma III Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Oleh :

HIFZAN DERJULIANDA

2100542049



PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN DAN KEUANGAN

KONSENTRASI KEUANGAN NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hifzan Derjulianda
No.BP	: 2100522049
Program Studi	: Keuangan & Perbankan
Judul Tugas Akhir	<i>Analisis Penggunaan Teknologi Keuangan Dalam meningkatkan Efisiensi Operasional Dinas Pariwisata</i>

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul *Analisis Penggunaan Teknologi Keuangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Dinas Pariwisata* merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebahagian maupun keseluruhan hasil karya orang lain yang saya kutip tanpa memberikan penghargaan yang semestinya kepada penulis aslinya. Bahagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ditemukan unsur plagiat dalam Tugas Akhir ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 24 Desember 2025
yang menyatakan,



Hifzan Derjulianda

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS

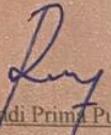
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: Hifzan Derjulianda
No.BP	: 2100522049
Jenjang Pendidikan	: Diploma III
Program Studi	: Keuangan & Perbankan
Judul Tugas Akhir	<i>Analisis Penggunaan Teknologi Keuangan Dalam meningkatkan Efisiensi Operasional Dinas Pariwisata</i>

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian komprehensif Tugas Akhir yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2025 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 24 Desember 2025
Pembimbing,


Dr. Febriandi Prima Putra, SE., M.Si
NIP. 197702062015011001

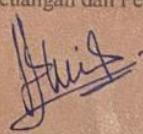
Mengetahui

Ketua Departemen Vokasi



Dr. Yulia Anas, SE, M.Si
NIP. 197107171999032002

Ketua Program Studi
Keuangan dan Perbankan



Dra. Leli Sumarni, MS, M.Si
NIP. 196212041987032001

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.6 Tempat dan Waktu Magang.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>).....	7
2.2 Jenis-Jenis Teknologi Keuangan	8
2.3 Dampak dan Manfaat <i>Fintech</i>	9
2.4 Pengertian Efisiensi Operasional	10
2.5 Hubungan Teknologi Keuangan dengan Efisiensi Operasional	11
2.6 Regulasi dan Kebijakan Terkait.....	11
2.7 Penelitian Terdahulu	13
2.8 Kerangka Pemikiran.....	13
BAB III. GAMBARAN UMUM	16
3.1 Sejarah Dinas Pariwisata Kota Padang.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Profil Dinas Pariwisata Kota Padang.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Logo Dinas Pariwisata Kota Padang	Error! Bookmark not defined.
3.4 Visi Misi Dinas Pariwisata Kota Padang	18
3.5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang.....	19
BAB IV. PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil Pengamatan	24
4.2 Analisis Penggunaan Teknologi Keuangan	25
4.3 Kendala dan Solusi	34

4.4 Dampak Penerapan Teknologi Keuangan terhadap Efisiensi Operasional	38
4.5 Kelebihan dan Kekurangan Sistem.....	40
4.6 Keterkaitan dengan Teori.....	42
BAB V. PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tabel penelitian terdahulu	13
Tabel 4.1.	Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan <i>Cash Management System (CMS)</i> Bank Nagari di Dinas Pariwisata Kota Padang.....	29
Tabel 4.2.	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pariwisata Kota Padang.....	32
Tabel 4.3.	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Dinas Pariwisata Kota Padang	34
Tabel 4.4.	Ringkasan Kendala dan Solusi Penggunaan Teknologi Keuangan	37
Tabel 4.5.	Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Teknologi Keuangan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2024 20



BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa perubahan besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang keuangan dan tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk inovasi yang muncul adalah **teknologi keuangan (financial technology/fintech)** yang memanfaatkan sistem digital dalam mempermudah proses transaksi, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Teknologi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan transparansi kegiatan keuangan baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan teknologi keuangan menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi serta pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital.

Salah satu instansi pemerintah daerah yang menerapkan teknologi keuangan adalah Dinas Pariwisata Kota Padang. Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Padang perlu memastikan pengelolaan keuangannya berjalan dengan tertib dan efisien. Penerapan beberapa sistem seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, SP2D Online, dan Cash Management System (CMS) Bank Nagari,

menjadi contoh nyata digitalisasi keuangan yang diterapkan untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Sebelum penerapan teknologi keuangan, proses administrasi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan pencairan dana, kesalahan dalam penginputan data, dan duplikasi dokumen. Dengan hadirnya teknologi keuangan, proses pencairan, pelaporan, dan pengawasan keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi, karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau oleh pihak terkait.

Namun, di sisi lain, penerapan teknologi keuangan juga memiliki tantangan. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai, dan terkadang terdapat kendala jaringan yang menghambat proses input data. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana penggunaan teknologi keuangan mampu meningkatkan efisiensi operasional di Dinas Pariwisata Kota Padang, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat penerapannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penggunaan Teknologi Keuangan dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional pada Dinas Pariwisata Kota Padang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan teknologi keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi keuangan terhadap efisiensi operasional pada Dinas Pariwisata Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang telah ditetapkan.

1. **Memahami Penerapan Teknologi Keuangan:** Menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami konsep, aplikasi, dan potensi teknologi keuangan seperti sistem manajemen keuangan berbasis cloud, aplikasi pembayaran digital, dan analisis keuangan otomatis dalam konteks dinas pariwisata.
2. **Menganalisis Tantangan dan Peluang:** Memberikan kesempatan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi keuangan di lingkungan dinas pariwisata, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi keuangan.
3. **Mengembangkan Keterampilan Penelitian dan Analisis:** Membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian, analisis data, dan interpretasi informasi untuk mengevaluasi dampak penggunaan teknologi keuangan terhadap operasional dan keuangan dinas pariwisata.

1.4 Manfaat Penelitian

Pengharapan dari penulisan yang dilaksanakan ini ialah memberikan beberapa manfaat lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akademik yang dimiliki.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan instansi serta membantu pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan keuangan yang dihadapi.

3. Bagi pihak lain

- a. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya.
- b. Sebagai bahan kajian dalam membandingkan antara bangku kuliah dan praktek lapangan.

1.5 Metode Penulisan

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung keinstansi terkait guna mendapatkan data yang diperlukan, serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan objek penulisan. Metode ini dilakukan dengan melaksanakan magang di Dinas Pariwisata Kota Padang.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap perlu dengan data yang diperlukan.

3. Studi Pustaka

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait dan mengunjungi website yang dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Pada program magang ini penulis memilih Dinas Pariwisata Kota Padang di JL. Gandaria No.56, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatra Barat sebagai tempat magang. Dalam menjalankan kegiatan ini, penulis menemukan waktu magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut penelitian, perumusan masalah, signifikan penelitian atau tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan teori inti berdasarkan judul yang dibahas.

BAB III GAMBARAN UMUM

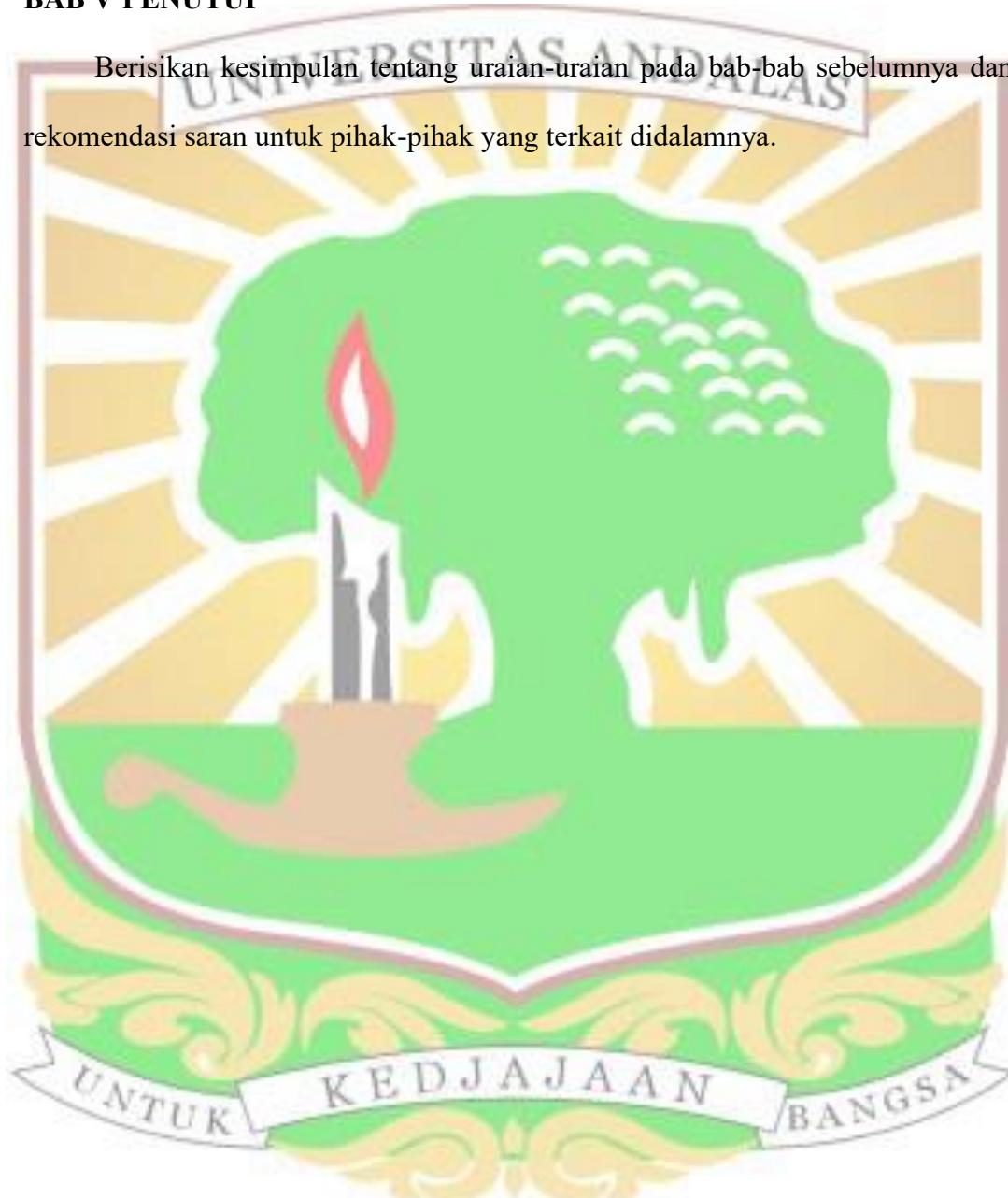
Mendeskripsikan gambaran umum tempat magang yaitu Dinas Pariwisata Kota padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Menguraikan hasil pengamatan dan analisis mengenai penerapan teknologi keuangan serta dampaknya terhadap efisiensi operasional.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan tentang uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan rekomendasi saran untuk pihak-pihak yang terkait didalamnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Teknologi Keuangan (*Financial Technology*)

Menurut Bank Indonesia (2023), teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, dan keamanan sistem pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) menjelaskan bahwa *fintech* merupakan inovasi di bidang layanan keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi kepada masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi keuangan merupakan integrasi antara sistem keuangan dengan teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi keuangan.

Menurut **Schueffel (2016)**: *Fintech* adalah inovasi finansial yang difasilitasi oleh penggunaan teknologi. Ini mencakup segala hal mulai dari pembayaran digital hingga *blockchain* dan *crowdfunding*. Menekankan peran teknologi dalam mengubah cara layanan keuangan tradisional beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen.

Menurut Nicoletti (2017): *Fintech* adalah solusi baru yang menunjukkan penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam industri keuangan. Fokus pada efisiensi dan inovasi yang dibawa oleh teknologi baru dalam sektor keuangan

Menurut Arner, Barberis, dan Buckley (2015) *Fintech* adalah pemberian layanan keuangan yang lebih baik dan inovatif melalui teknologi. Ini mencakup aplikasi, produk, dan model bisnis baru yang menggantikan metode tradisional dalam penyediaan layanan keuangan. Melihat *Fintech* sebagai penggerak perubahan yang signifikan dalam industri keuangan melalui teknologi.

2.2 Jenis-Jenis Teknologi Keuangan

Menurut PWC (2021) dan OJK (2022), teknologi keuangan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. *Payment System* (Sistem Pembayaran Digital)

Meliputi layanan transfer dana, *e-money*, dan *payment gateway*. Dalam konteks pemerintahan, sistem ini digunakan dalam transaksi non-tunai dan pencairan dana kegiatan.

2. *Lending and Financing* (Pembiayaan Digital)

Platform yang mempertemukan pihak pemberi dan penerima pinjaman secara daring. Meskipun umum di sektor swasta, prinsip digitalisasi pembiayaan juga diterapkan pada sistem keuangan pemerintah.

3. *Investment and Wealth Management*

Layanan untuk pengelolaan dan investasi aset secara digital.

4. *Crowdfunding dan Peer-to-Peer (P2P) Platform*

Layanan pengumpulan dana melalui sistem digital.

5. *Financial Infrastructure dan Data Analytics*

Sistem pendukung utama seperti **SIMDA**, **SIPKD**, dan **SP2D Online**, yang digunakan dalam tata kelola keuangan daerah.

Dalam instansi pemerintahan seperti Dinas Pariwisata Kota Padang, jenis fintech yang relevan adalah *financial infrastructure* yang berfokus pada sistem digitalisasi keuangan daerah, bukan transaksi publik secara langsung.

2.3 Dampak dan Manfaat Fintech

1. Efisiensi dan Kecepatan:

Manfaat: Mengurangi waktu dan biaya transaksi, mempercepat proses keuangan seperti pembayaran dan pinjaman.

2. Aksesibilitas:

Manfaat: Memperluas akses ke layanan keuangan bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank atau kurang terlayani oleh institusi keuangan tradisional.

3. Transparansi:

Manfaat: Meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi risiko penipuan melalui teknologi blockchain dan keamanan digital.

4. Inovasi Produk:

Manfaat: Menciptakan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen modern, seperti investasi otomatis dan layanan pembayaran mobile.

2.4 Pengertian Efisiensi Operasional

Menurut Siagian (2018), **efisiensi operasional** merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, dan biaya) secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. Sedangkan menurut Mulyadi (2020), efisiensi operasional diukur dari sejauh mana organisasi dapat mengurangi pemborosan, menekan biaya, serta mempercepat waktu proses kerja tanpa menurunkan kualitas hasil.

James A. Fitzsimmons dan Mona J. Fitzsimmons (2011): Menurut mereka, operasional adalah kegiatan yang diorientasikan pada penciptaan nilai melalui produksi barang dan jasa serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya

William J. Stevenson (2018): Menggambarkan operasional sebagai fungsi yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu organisasi melalui transformasi input menjadi output yang bernilai tambah

Dalam konteks organisasi pemerintah, efisiensi operasional mencakup kemampuan instansi dalam menjalankan kegiatan administrasi dan keuangan secara cepat, tepat, dan hemat, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan teknologi keuangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui:

- a) Pengurangan waktu dalam proses administrasi,
- b) Otomatisasi transaksi keuangan,
- c) Pengurangan risiko kesalahan manusia (human error),
- d) Meningkatkan transparansi serta kemudahan pengawasan.

2.5 Hubungan Teknologi Keuangan dengan Efisiensi Operasional

Menurut Jogiyanto (2017), penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan berperan meningkatkan efisiensi operasional karena sistem digital memungkinkan integrasi data, otomatisasi proses, dan pengurangan duplikasi pekerjaan.

Dalam pemerintahan daerah, penerapan sistem seperti **SP2D Online**, **SIPKD**, dan **SIMDA Keuangan** membantu mempercepat proses pencairan dana dan pelaporan, sehingga efisiensi kerja meningkat. Penelitian oleh Siregar dan Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Secara konseptual, hubungan antara teknologi keuangan dan efisiensi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Input: Penerapan sistem berbasis digital seperti SP2D Online, CMS, dan SIMDA.
2. Proses: Pengelolaan data keuangan secara otomatis dan terintegrasi.
3. Output: Peningkatan efisiensi waktu, ketepatan data, dan transparansi pengelolaan keuangan.

Dengan kata lain, semakin optimal pemanfaatan teknologi keuangan, semakin efisien pula operasional instansi pemerintah.

2.6 Regulasi dan Kebijakan Terkait

Beberapa regulasi yang menjadi dasar penerapan teknologi keuangan di pemerintahan daerah antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peraturan ini merupakan dasar hukum transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi secara digital, termasuk penggunaan aplikasi SIPKD dan SIMDA.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Peraturan ini mengatur kerangka kerja dan standar penyelenggaraan inovasi keuangan digital di Indonesia.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah Daerah. Pada peraturan ini mendorong penggunaan sistem non-tunai dan digitalisasi transaksi dalam seluruh kegiatan keuangan daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan Utama
1	Siregar & Nurhayati (2021)	Pengaruh Penerapan SIMDA terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	SIMDA meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelaporan.
2	Wulandari (2022)	Implementasi SP2D Online pada Pemerintah Kota Surabaya	SP2D Online mempercepat proses pencairan dan mengurangi kesalahan administrasi.
3	Haris (2023)	Penggunaan CMS Bank Nagari dalam Efisiensi Transaksi Pemerintah Daerah	CMS meningkatkan kecepatan transaksi dan transparansi dana publik.

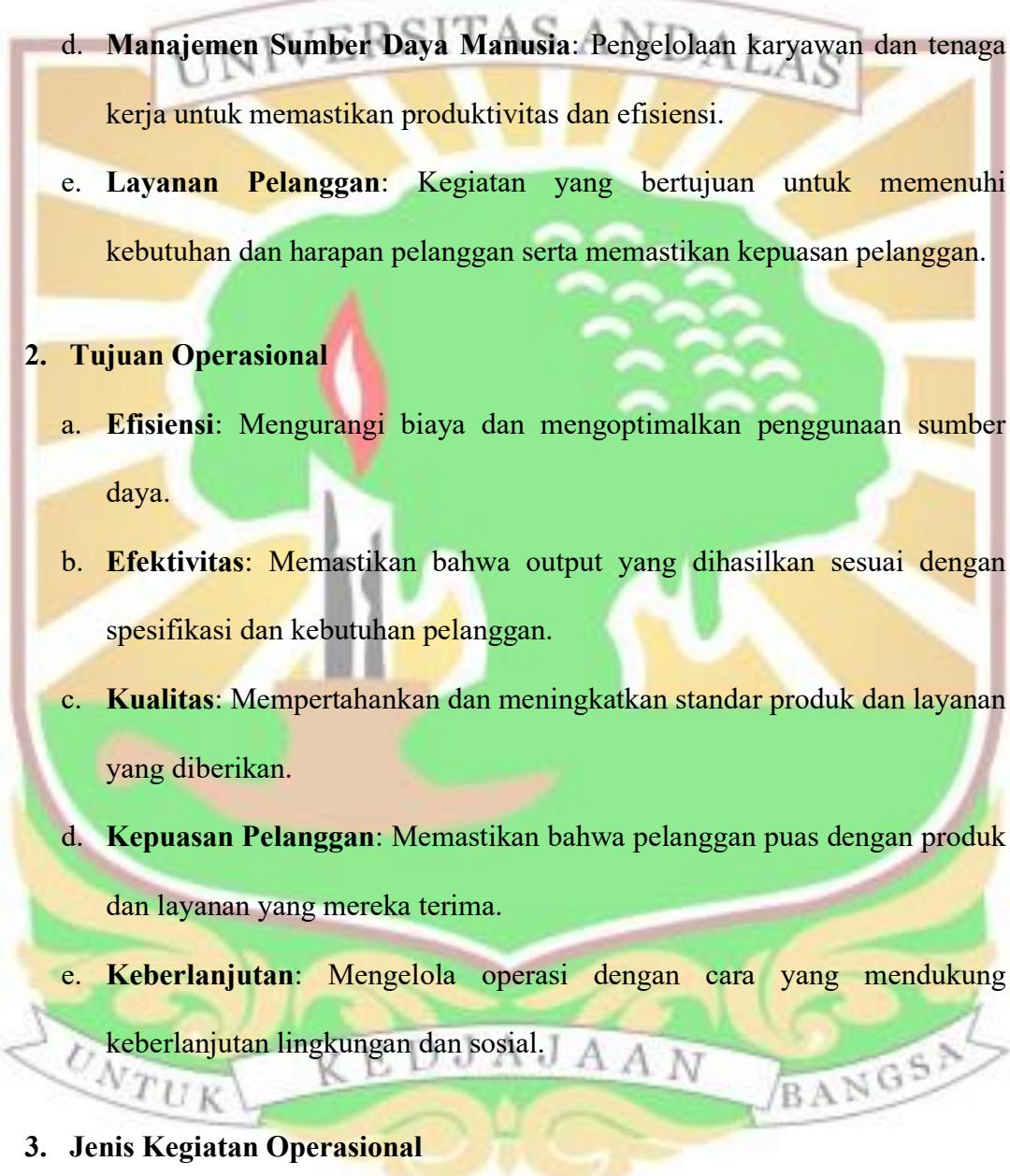
Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi keuangan pada instansi pemerintah berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional, sejalan dengan tujuan penelitian ini.

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada hubungan antara variabel penerapan teknologi keuangan dan efisiensi operasional. Kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Operasional

- Proses Produksi:** Kegiatan yang melibatkan pengubahan bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi.

- 
- b. **Manajemen Rantai Pasokan:** Koordinasi dan pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga pelanggan akhir.
 - c. **Logistik:** Pengelolaan aliran barang dan jasa dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
 - d. **Manajemen Sumber Daya Manusia:** Pengelolaan karyawan dan tenaga kerja untuk memastikan produktivitas dan efisiensi.
 - e. **Layanan Pelanggan:** Kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta memastikan kepuasan pelanggan.

2. Tujuan Operasional

- a. **Efisiensi:** Mengurangi biaya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- b. **Efektivitas:** Memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan.
- c. **Kualitas:** Mempertahankan dan meningkatkan standar produk dan layanan yang diberikan.
- d. **Kepuasan Pelanggan:** Memastikan bahwa pelanggan puas dengan produk dan layanan yang mereka terima.
- e. **Keberlanjutan:** Mengelola operasi dengan cara yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.

3. Jenis Kegiatan Operasional

- a. **Operasional Harian:** Kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari untuk menjaga kelancaran bisnis, seperti produksi, pemrosesan pesanan, dan layanan pelanggan.

- b. **Operasional Strategis:** Kegiatan yang direncanakan untuk jangka panjang, seperti pengembangan produk baru, ekspansi pasar, dan peningkatan kapasitas produksi.
- c. **Operasional Taktis:** Kegiatan yang mencakup perencanaan dan pengendalian jangka menengah, seperti pengelolaan inventaris, perencanaan produksi, dan penjadwalan tenaga kerja.

4. Manajemen Operasional

- a. **Pengertian:** Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berfokus pada pengelolaan proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas operasi.
- b. **Fungsi:** Termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas operasional untuk mencapai tujuan bisnis.

5. Pengukuran Kinerja Operasional

- a. **Indikator Kinerja Utama (KPI):** Pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi, seperti waktu siklus produksi, tingkat cacat, biaya produksi, dan tingkat kepuasan pelanggan.
- b. **Benchmarking:** Membandingkan kinerja operasional dengan standar industri atau pesaing untuk mengidentifikasi area perbaikan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Dinas Pariwisata Kota Padang

Pada tahun 1983, guna mengatur dan mengelola objek wisata Pantai Padang yang mencakup aspek ketertiban, kenyamanan, serta pengelolaan retribusi masuk dan retribusi pedagang, dibentuk sebuah Satuan Tugas (SATGAS). Kepemimpinan SATGAS tersebut berada di bawah Bapak Al Manar yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Selanjutnya, pada tahun 1986, SATGAS mengalami perubahan menjadi Badan Pengelola Pariwisata Kota Padang dengan fokus utama pada pengelolaan kawasan pantai wisata di Kota Padang. Lembaga ini dipimpin oleh Drs. Dasril Ramli.

Dalam kurun waktu 1994 hingga 1999, terjadi sebanyak tiga kali pergantian pimpinan. Memasuki tahun 2000, Dinas Pariwisata memperoleh tambahan tanggung jawab yang signifikan, yaitu pengelolaan kebudayaan tradisional yang ada di Kota Padang. Seiring dengan perluasan tugas tersebut, nama instansi kemudian diubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Sejalan dengan dinamika organisasi, pergantian kepemimpinan terus berlangsung, hingga pada tahun 2015 tercatat telah terjadi sembilan kali pergantian pimpinan.

Pada akhir tahun 2015 berganti lagi pimpinannya yaitu Medi Iswandi, ST., MT. Dengan terbitnya Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berganti nama menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Dengan STOK baru ini Meida Iswandi, ST., MT. Menduduki jabatan

kepala dinas sampai tanggal 6 Februari 2019. Pada tanggal 11 juni 2019 dilantiklah Drs, Arfian secara definitif oleh Walikota padang sebagai kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pada awal Januari 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang berganti nama menjadi Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pariwisata.

3.2 Profil Dinas Pariwisata Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata yang mulai diberlakukan pada awal Januari 2021, instansi yang sebelumnya bernama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang resmi berubah nama menjadi Dinas Pariwisata. Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dinas tersebut memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas yang dimaksud, maka dinas pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif

4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif
6. Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata dan bidang ekonomi kreatif.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Logo Dinas Pariwisata Kota Padang



Gambar 3.1 Logo Dinas Pariwisata Kota Padang

Sumber: <https://pariwisata.padang.go.id>

3.4 Visi Misi Dinas Pariwisata Kota Padang

Dalam upaya merealisasikan tujuan organisasi, Dinas Pariwisata menetapkan visi dan misi sebagai arah kebijakan. Penetapan visi tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian visi Kota Padang, yaitu "*Menjadikan Padang sebagai Destinasi Wisata Pesisir yang Nyaman dan Berkesan*". Sejalan dengan visi tersebut serta berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dinas sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan sektor kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, Dinas Pariwisata Kota Padang merumuskan visi sebagai berikut:

1. Visi

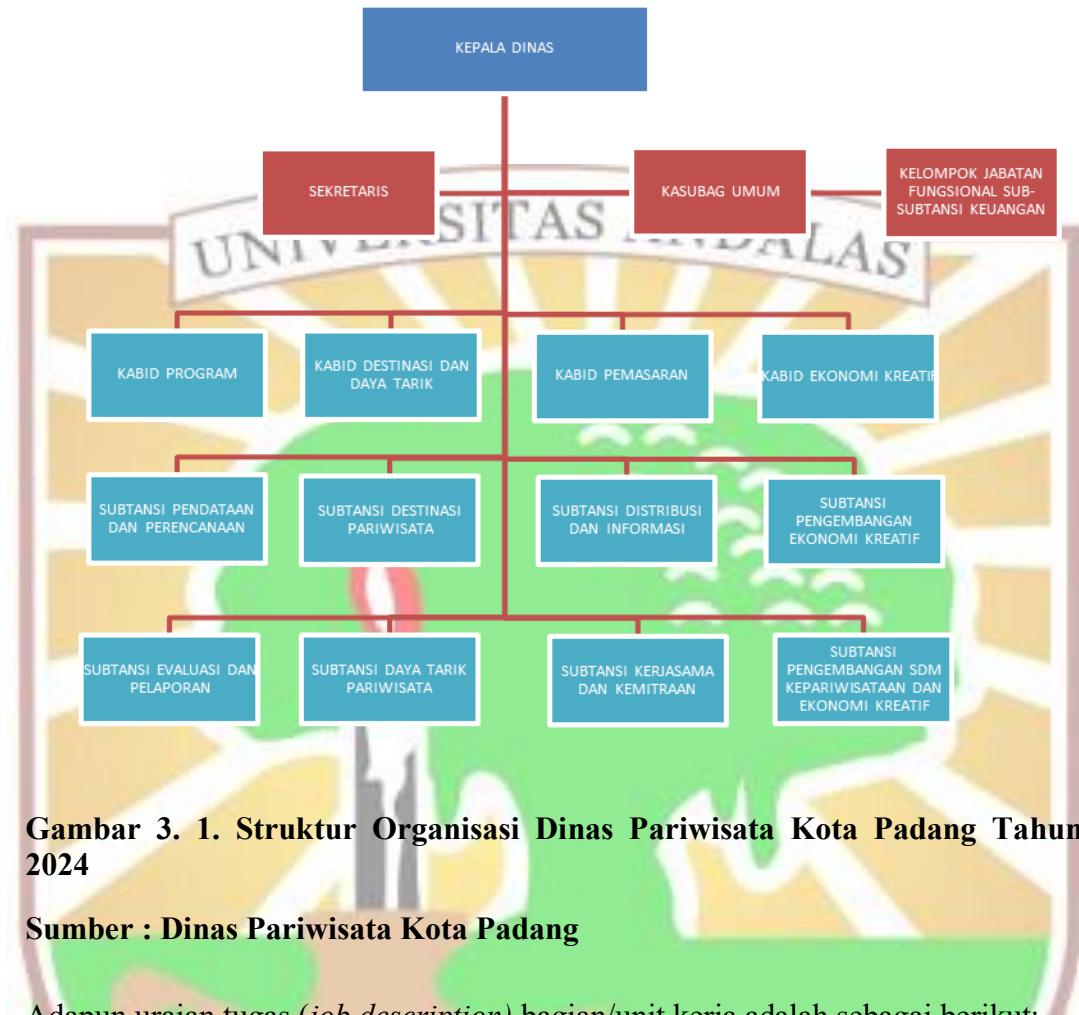
“Menjadikan Padang sebagai Destinasi Wisata
Pesisir yang Nyaman dan Berkesan”

2. Misi

1. Meningkatkan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dengan cara holistik serta berkepanjangan dengan mengikutsertakan peran aktif dari masyarakat.
2. Menjaga dan mengembangkan adat budaya Minangkabau yang beraneka ragam sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang turun temurun diperlakukan dan dipelihara.
3. Mengembangkan potensi pulau-pulau kecil sebagai kawasan potensial pengembangan pariwisata ke depan, khususnya wisata bahari.
4. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata sehingga mampu mengembangkan peranannya dalam pembangunan umumnya dan pendapatan daerah pada khususnya.
5. Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan untuk daya tarik wisata.
6. Mengembangkan usaha ekonomi lokal serta melengkapi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata.

3.5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang berdasarkan peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pariwisata terdiri dari:



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2024

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang

Adapun uraian tugas (*job description*) bagian/unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan bidang periwisata dan ekonomi kreatif dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya urusan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan

Dinas dalam urusan umum, perlengkapan dan peralatan, keungan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, sekretaris dibantu oleh 2 bagian yaitu:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Selain itu, Sub Bagian Umum bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi barang milik daerah yang terdapat pada dinas, administrasi kepegawaian, serta penyediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, peralatan, dan perlengkapan perkantoran. Sub Bagian ini juga melaksanakan kegiatan kehumasan, komunikasi dan informasi, pengelolaan arsip, perpustakaan, serta dokumentasi.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas.

3. Bidang Program

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan

Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam menghimpun data dan menyusun program dan perencanaan Dinas.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan mengenai program dan perencanaan Dinas.

4. Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

a. Seksi Destinasi Pariwisata

Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memajukan dan mengembangkan destinasi pariwisata.

b. Seksi Daya Tarik Pariwisata

Seksi Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memajukan dan mengembangkan daya tarik pariwisata.

5. Bidang Pemasaran

a. Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata

Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran dalam memajukan dan mengembangkan pemasaran pariwisata.

b. Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata

Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memajukan, mengembangkan kerjasama dan kemitraan pariwisata.

6. Bidang Ekonomi Kreatif

a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam memajukan dan mengembangkan Ekonomi Kreatif.

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam memajukan dan mengembangkan Ekonomi Kreatif.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pariwisata

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengamatan

Selama melaksanakan kegiatan magang pada Dinas Pariwisata Kota Padang, penulis secara aktif mengamati dan terlibat dalam kegiatan administrasi keuangan, khususnya dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pencairan dana kegiatan. Beberapa aktivitas rutin yang dilakukan oleh pegawai, seperti bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), terlihat telah memanfaatkan sistem digital sebagai alat utama dalam menunjang kelancaran kerja.

Dalam keseharian, proses pengajuan dana dilakukan secara elektronik melalui aplikasi **SP2D Online**. Misalnya, saat kegiatan promosi pariwisata hendak dilaksanakan, bendahara akan mengajukan permintaan pencairan dana kepada BPKAD melalui aplikasi ini. Proses yang sebelumnya memerlukan pengantaran berkas fisik kini bisa dilakukan hanya dengan mengunggah dokumen elektronik dan mendapatkan notifikasi status langsung dari sistem.

Selain itu, penulis juga mengamati penggunaan **CMS Bank Nagari**. Aplikasi ini sangat membantu proses transfer keuangan ke pihak ketiga, seperti pembayaran vendor, penginapan, dan konsumsi. Bendahara tidak lagi harus datang ke bank, melainkan cukup login ke sistem dan melakukan transaksi dari ruang kerja.

Kegiatan lain yang melibatkan penulis adalah penginputan data anggaran dan realisasi ke dalam **SIPKD**, serta pembuatan laporan

pertanggungjawaban (LPJ) bulanan menggunakan **SIMDA Keuangan**. Penulis melihat bagaimana sistem ini menyajikan data secara otomatis dan terstruktur, memudahkan bendahara saat menyusun laporan ke atasan atau untuk audit.

Dari keseluruhan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa proses keuangan di Dinas Pariwisata sudah cukup terotomatisasi, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan dukungan dari pemahaman pegawai terhadap fungsi masing-masing sistem.

4.2 Analisis Penggunaan Teknologi Keuangan

Berdasarkan hasil observasi dan keterlibatan langsung selama kegiatan magang, penulis mencatat bahwa Dinas Pariwisata Kota Padang telah menggunakan beberapa sistem teknologi keuangan yang mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah. Setiap sistem memiliki peran tersendiri yang saling melengkapi dan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional.

1. SP2D Online (Mempercepat Pencairan Dana)

SP2D (*Surat Perintah Pencairan Dana*) Online merupakan salah satu sistem utama yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang, termasuk Dinas Pariwisata, untuk mencairkan anggaran dari kas daerah ke rekening masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan adanya sistem ini, bendahara pengeluaran tidak lagi perlu menyerahkan dokumen fisik ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Seluruh proses dilakukan sepenuhnya secara daring, mulai dari tahap pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana ke rekening operasional dinas.

Sebelum penerapan SP2D Online, proses pencairan dana dilakukan secara manual. Bendahara harus menyiapkan berkas fisik seperti RKA, SPD, SPP, dan SPM, kemudian menyerahkannya langsung ke kantor BPKAD untuk diverifikasi. Proses tersebut umumnya memakan waktu 2–3 hari kerja, tergantung antrean dan kelengkapan dokumen. Selain itu, setiap koreksi atau kekurangan dokumen mengharuskan bendahara untuk datang kembali ke kantor keuangan, sehingga menambah waktu dan biaya operasional.

Setelah penerapan SP2D Online, seluruh dokumen tersebut cukup dipindai (*scan*) dan diunggah melalui aplikasi sistem daring. Contohnya yang penulis amati adalah saat pencairan anggaran untuk kegiatan “*Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata*”. Pada proses ini, bendahara hanya memindai dokumen (RKA, SPD, SPP, dan SPM), mengunggahnya ke aplikasi SP2D Online, dan menunggu verifikasi dari BPKAD.

Notifikasi status pengajuan diterima langsung melalui sistem, dan dana masuk ke rekening operasional dalam waktu kurang dari satu hari kerja. Perubahan tersebut menunjukkan adanya lonjakan efisiensi waktu dan transparansi proses. Bila sebelumnya diperlukan waktu 2–3 hari kerja, kini pencairan bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Selain itu, semua tahapan terekam otomatis dalam sistem, sehingga memudahkan pelacakan status dan pengawasan.

Manfaat langsung penerapan SP2D Online di Dinas Pariwisata Kota Padang antara lain:

- 
- a. Menghemat waktu 2–3 hari kerja dibandingkan metode manual sebelumnya.
 - b. Menghindari antrian dan penyerahan berkas fisik di kantor keuangan daerah.
 - c. Meningkatkan transparansi karena seluruh tahapan pencairan terekam otomatis dan dapat dipantau oleh pejabat terkait.
 - d. Mengurangi risiko kehilangan dokumen dan kesalahan administratif akibat duplikasi berkas.
 - e. Memperkuat akuntabilitas keuangan melalui pencatatan digital yang dapat diaudit dengan mudah.

Dengan adanya perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SP2D Online memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional Dinas Pariwisata Kota Padang, baik dari segi waktu pencairan, kemudahan prosedur, maupun peningkatan transparansi pengelolaan keuangan.

2. CMS Bank Nagari (Transaksi Non-Tunai Langsung dari Kantor)

Cash Management System (CMS) merupakan layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh Bank Nagari untuk mendukung transaksi non-tunai pemerintah daerah. Sistem ini memungkinkan bendahara pengeluaran melakukan transfer dana secara langsung dari kantor tanpa perlu datang ke bank, baik untuk pembayaran ke pihak ketiga seperti vendor, hotel, maupun pelaksana kegiatan dinas.

Sebelum penerapan CMS, proses pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan secara manual. Bendahara harus datang langsung ke kantor

cabang Bank Nagari untuk menyerahkan berkas fisik dan mengisi formulir transaksi. Proses ini biasanya membutuhkan waktu setidaknya satu hari kerja, bahkan bisa lebih lama jika antrean di bank ramai atau ada koreksi berkas. Selain itu, setiap transaksi harus disertai bukti tanda tangan pejabat berwenang secara manual, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian.

Setelah penerapan **CMS Bank Nagari**, seluruh proses pembayaran dapat dilakukan secara digital dari kantor Dinas Pariwisata. Setelah dana SP2D dicairkan, bendahara cukup masuk ke portal CMS menggunakan akun resmi yang dilindungi dengan autentikasi ganda (*two-factor authentication*). Melalui portal tersebut, bendahara memilih rekening sumber dan tujuan, menginput nominal, serta menambahkan deskripsi pembayaran. Proses verifikasi dan persetujuan dilakukan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pengamatan penulis selama magang, CMS Bank Nagari telah digunakan untuk berbagai kegiatan operasional, termasuk dalam kegiatan “*Promosi Wisata Kuliner Lokal*”. Pada kegiatan tersebut, seluruh pembayaran kepada pihak penyedia jasa seperti katering, dokumentasi, dan media promosi dilakukan melalui CMS. Dana langsung ditransfer ke rekening penerima dalam hitungan menit setelah disetujui, tanpa perlu kunjungan ke bank.

Tabel 4. 1. Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan *Cash Management System* (CMS) Bank Nagari di Dinas Pariwisata Kota Padang dapat dilihat sebagai berikut:

Aspek	Sebelum CMS	Sesudah CMS
Waktu Transaksi	±1 hari kerja karena harus datang ke bank	±30 menit – 1 jam selesai secara daring
Biaya Operasional	Ada biaya transportasi dan cetak dokumen	Hampir nol biaya tambahan
Keamanan dan Akurasi	Rawan kesalahan manual dan keterlambatan	Sistem otomatis dengan histori digital
Aksesibilitas	Hanya dapat dilakukan di jam operasional bank	Dapat dilakukan kapan saja selama jaringan aktif

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara, 2024

Keunggulan penerapan CMS Bank Nagari di Dinas Pariwisata Kota Padang antara lain:

- Meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya transportasi pegawai.
- Mengurangi risiko kesalahan pengiriman dana karena sistem menyimpan histori transaksi secara otomatis.
- Menjamin keamanan transaksi karena hanya pejabat berwenang yang memiliki akses login.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena semua data transaksi dapat dilihat oleh auditor atau pimpinan dinas.

Penerapan CMS Bank Nagari ini sejalan dengan teori **Laudon dan Laudon (2018)** yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi organisasi melalui otomatisasi

proses dan integrasi data keuangan. Selain itu, hasil ini juga memperkuat penelitian **Haris (2023)** yang menemukan bahwa CMS Bank Nagari berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kecepatan transaksi keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan CMS Bank Nagari memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional Dinas Pariwisata Kota Padang, terutama dalam aspek kecepatan, keamanan, dan kemudahan transaksi keuangan non-tunai.

3. SIPKD (Manajemen Informasi Keuangan Daerah)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu inovasi utama yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengelola keuangan daerah secara digital. Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui SIPKD, seluruh tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sebelum penerapan SIPKD, proses penganggaran dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan lembar kerja Excel dan dokumen fisik. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan pada pengisian kode rekening belanja, keterlambatan validasi, dan kesulitan dalam melakukan rekapitulasi anggaran. Validasi data juga harus dilakukan

dengan membawa dokumen ke BPKAD, yang memakan waktu dan menimbulkan risiko duplikasi atau kesalahan input.

Sejak penerapan SIPKD, seluruh proses tersebut menjadi lebih cepat dan akurat. Selama magang, penulis mengamati bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran menggunakan SIPKD untuk:

- a) Menginput kode rekening belanja sesuai kegiatan,
- b) Menyusun dokumen SPD (Surat Penyediaan Dana), dan
- c) Memantau realisasi anggaran setiap kegiatan secara real time.

Selain itu, sistem SIPKD otomatis menolak atau memberikan peringatan apabila terjadi kelebihan anggaran atau kesalahan pengisian kode rekening. Fitur ini sangat membantu dalam mencegah kesalahan administratif yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual.

Manfaat langsung penerapan SIPKD di Dinas Pariwisata Kota Padang antara lain:

- a. Meminimalisir kesalahan dalam pengisian kode belanja karena sistem memiliki validasi otomatis.
- b. Mempermudah pelaporan dan rekapitulasi anggaran melalui tampilan data real time.
- c. Memberikan peringatan otomatis jika terjadi kelebihan anggaran atau ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi.
- d. Meningkatkan kecepatan proses penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan.

Tabel 4. 2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pariwisata Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Sebelum SIPKD	Sesudah SIPKD
Proses Input Anggaran	Manual menggunakan Excel	Digital dan otomatis dalam sistem
Validasi Data	Dilakukan langsung di kantor BPKAD	Otomatis dan terintegrasi
Kesalahan Kode Rekening	Sering terjadi karena human error	Minim karena sistem memberi notifikasi
Pelaporan dan Rekapitulasi	Memakan waktu 2–3 hari	Dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja
Akses Data	Terbatas dan tidak real time	Real time dan terhubung antarinstansi

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara, 2024

Berdasarkan pengamatan penulis, penerapan SIPKD membuat proses pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata menjadi lebih tertib dan efisien. Data anggaran dan realisasi kini dapat dilihat kapan saja tanpa menunggu laporan manual dari tiap bidang. Selain itu, koordinasi antara dinas dan BPKAD menjadi lebih lancar karena sistem secara otomatis menyesuaikan setiap perubahan data.

Temuan ini sesuai dengan teori **Siregar dan Nurhayati (2021)** yang menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan daerah berbasis teknologi seperti SIPKD mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan mempercepat proses administrasi keuangan. Hal ini juga mendukung pendapat **Jogiyanto (2017)** bahwa sistem informasi keuangan yang terintegrasi berperan penting dalam mempercepat aliran data dan mengurangi redundansi informasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPKD berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional Dinas Pariwisata Kota Padang, terutama dalam hal kecepatan pelaporan, ketepatan penganggaran, dan pengawasan penggunaan dana kegiatan.

4. e-Katalog LKPP (Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Tender)

Penerapan e-Katalog LKPP (Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah)

Untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, **Dinas Pariwisata Kota Padang** telah menerapkan sistem **e-Katalog LKPP**, yaitu platform pengadaan digital yang dikelola oleh **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**. Sistem ini memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memilih dan membeli barang atau jasa yang tersedia secara nasional dari penyedia resmi tanpa harus melalui proses lelang atau tender terbuka.

Sebelum penerapan e-Katalog, proses pengadaan dilakukan secara manual melalui prosedur lelang konvensional. Dokumen pengadaan disiapkan oleh panitia, diserahkan ke bagian pengadaan, dan memerlukan waktu validasi dari beberapa pihak. Proses tersebut rata-rata memakan waktu **10–14 hari kerja** tergantung nilai dan jenis barang yang dibutuhkan. Selain lama, sistem manual juga membuka peluang terjadinya keterlambatan administrasi atau perbedaan harga karena kurangnya standar harga barang antar penyedia.

Sejak penggunaan **e-Katalog LKPP**, proses pengadaan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efisien. Staf cukup memilih barang atau jasa yang dibutuhkan melalui katalog daring, mencetak dokumen pemesanan, dan menyerahkannya ke bagian keuangan untuk proses pencairan. Sebagai contoh, saat pengadaan *alat tulis kantor*, staf hanya membutuhkan waktu

2–3 hari kerja untuk menyelesaikan seluruh proses, dari pemilihan barang hingga dokumen siap dibayarkan.

Tabel 4. 3. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Katalog

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP) di Dinas Pariwisata Kota Padang

Aspek	Sebelum e-Katalog	Sesudah e-Katalog
Proses Pengadaan	Manual, melalui panitia lelang	Digital melalui portal LKPP
Waktu Penyelesaian	±10–14 hari kerja	±2–3 hari kerja
Transparansi Harga	Bervariasi antarpenyedia	Harga standar nasional LKPP
Risiko Kesalahan Dokumen	Cukup tinggi karena manual	Minim, karena sistem otomatis
Efisiensi Biaya	Ada biaya administrasi cetak dan perjalanan	Nyaris tanpa biaya tambahan

Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara, 2024

Temuan ini sejalan dengan teori **Laudon & Laudon (2018)** bahwa penerapan sistem digital dalam proses administrasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan kerja organisasi. Selain itu, penerapan e-Katalog LKPP mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

4.3 Kendala dan Solusi

Meskipun penggunaan teknologi keuangan telah membawa banyak kemudahan dan efisiensi, dalam pelaksanaannya di Dinas Pariwisata Kota

Padang tetap ditemukan sejumlah kendala teknis dan non-teknis. Penulis mengelompokkan kendala ini menjadi tiga kategori utama: kendala teknis, kendala sumber daya manusia, dan kendala integrasi antar sistem.

1. Kendala Teknis

Kendala teknis merupakan hambatan yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, maupun perangkat keras yang digunakan dalam operasional keuangan berbasis teknologi.

Beberapa contoh kendala teknis yang ditemui di lapangan:

- a) **Koneksi internet tidak stabil:** Proses input data ke sistem seperti SIPKD atau pengajuan SP2D Online kadang terhambat karena gangguan koneksi, terutama pada jam sibuk atau ketika server pusat mengalami overload.
- b) **Sistem mengalami downtime:** Beberapa kali aplikasi CMS Bank Nagari tidak dapat diakses dalam waktu tertentu karena adanya maintenance dari pihak bank, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran kepada pihak ketiga.
- c) **Perangkat komputer tidak merata:** Tidak semua pegawai memiliki akses ke komputer atau laptop yang memadai, sehingga pekerjaan kadang harus antre atau dipusatkan pada satu unit perangkat.

Solusi:

- a) Mengusulkan peningkatan kapasitas bandwidth kantor dan backup jaringan dengan modem seluler.

- b) Menyusun jadwal transaksi dan penginputan agar tidak terjadi beban bersamaan pada sistem.
- c) Melakukan pengadaan perangkat komputer tambahan dan peremajaan perangkat lama.

2. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun sistem telah disediakan dan diterapkan, tantangan terbesar justru berasal dari **tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai** dalam mengoperasikan sistem teknologi keuangan.

Beberapa kasus nyata yang diamati:

- a) Pegawai yang sudah lama bekerja merasa kurang nyaman menggunakan sistem baru dan lebih memilih cara manual.
- b) Terjadi kesalahan input data karena kurangnya pelatihan teknis.
- c) Beberapa pegawai belum familiar dengan proses revisi anggaran atau penginputan SPD melalui SIPKD.

Solusi:

- a) Dinas secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi keuangan.
- b) Menyediakan SOP tertulis atau video tutorial internal sebagai panduan penggunaan sistem.
- c) Menugaskan pegawai muda yang lebih fasih teknologi untuk mendampingi staf senior dalam proses input data.

3. Kendala Integrasi Sistem

Terkadang, antar aplikasi belum terintegrasi secara otomatis, sehingga data harus diinput ulang atau dipindahkan manual dari satu sistem ke sistem lain.

Contoh:

- a) Data dari SIPKD tidak langsung masuk ke SIMDA, sehingga terjadi duplikasi input.
- b) Pengadaan melalui e-Katalog tidak selalu sinkron dengan kode akun belanja yang tersedia di SIPKD.

Solusi:

- a) Koordinasi antar OPD (terutama dengan BPKAD) untuk menyelaraskan format dan kode rekening.
- b) Mendorong pemerintah daerah untuk memperbarui sistem agar terintegrasi secara horizontal antar aplikasi keuangan.

Tabel 4. 4. Ringkasan Kendala dan Solusi Penggunaan Teknologi Keuangan

No	Jenis Kendala	Contoh Kasus di Lapangan	Solusi yang Diterapkan
1	Teknis	Aplikasi CMS tidak bisa diakses saat pembayaran vendor	Penjadwalan ulang transaksi, komunikasi dengan bank
2	Jaringan	SIPKD gagal input karena koneksi lambat	Gunakan jaringan cadangan (modem)
3	SDM	Pegawai salah input kode rekening di SIPKD	Pelatihan rutin, pendampingan staf TI

No	Jenis Kendala	Contoh Kasus di Lapangan	Solusi yang Diterapkan
4	Integrasi Sistem	Data dari e-Katalog tidak langsung terbaca di SIPKD	Sinkronisasi manual dan revisi kode belanja
5	Perangkat Keras	Beberapa staf berbagi 1 komputer untuk input CMS dan SIPKD	Usulan pengadaan komputer tambahan

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara, 2024

Kendala-kendala tersebut tidak menjadi penghalang utama karena pihak Dinas Pariwisata menunjukkan upaya aktif untuk mencari solusi dan beradaptasi. Justru, proses adaptasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan bukan hanya soal alat, tetapi juga kesiapan organisasi dan budaya kerja

4.4 Dampak Penerapan Teknologi Keuangan terhadap Efisiensi Operasional

Penerapan teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mendukung pelaksanaan **transaksi non-tunai (cashless) dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.**

Berdasarkan hasil observasi, sistem keuangan digital yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang meliputi:

1. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

Sistem ini digunakan untuk mengelola perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Melalui SIPKD, setiap kegiatan dan anggaran dapat

dipantau secara terpusat oleh bagian keuangan dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). SIPKD memudahkan proses pembuatan dokumen seperti DPA, RKA, dan laporan realisasi anggaran, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual dan mempercepat pelaporan.

2. SIMDA Keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu pengelolaan keuangan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dinas Pariwisata menggunakan SIMDA untuk pencatatan transaksi harian dan penyusunan laporan bulanan keuangan dinas.

3. SP2D Online (Surat Perintah Pencairan Dana Online)

Sistem ini digunakan untuk mempercepat proses pencairan dana kegiatan. Sebelum adanya sistem online, pengajuan SP2D dilakukan secara manual yang memakan waktu beberapa hari. Dengan sistem digital, proses pencairan dapat dilakukan dalam hitungan jam.

4. CMS Bank Nagari (*Cash Management System*)

CMS digunakan untuk transaksi keuangan digital antara Dinas Pariwisata dan Bank Nagari. Melalui CMS, bagian keuangan dapat melakukan pengecekan saldo, transfer, dan monitoring transaksi secara real time tanpa perlu datang ke bank.

Penerapan sistem-sistem di atas menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Padang telah mengintegrasikan teknologi keuangan untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi keuangan.

4.5 Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Penerapan teknologi keuangan dalam lingkungan pemerintahan daerah, termasuk pada Dinas Pariwisata Kota Padang, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi birokrasi keuangan. Namun demikian, sebagaimana halnya dengan inovasi teknologi lainnya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan dan dievaluasi secara berkala.

Berikut adalah uraian kelebihan dan kekurangan berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman langsung selama kegiatan magang:

1. Kelebihan Penggunaan Teknologi Keuangan

a) Efisiensi Proses Administratif

Penggunaan sistem seperti **SP2D Online**, **SIPKD**, dan **CMS Bank Nagari** memangkas prosedur manual yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga. Proses pencairan, input anggaran, dan pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam waktu singkat dan tanpa perpindahan lokasi.

b) Peningkatan Akurasi Data

Dengan sistem digital, peluang terjadinya kesalahan input data atau penghitungan menjadi lebih kecil. Misalnya, aplikasi **SIMDA Keuangan** akan langsung menampilkan total pengeluaran dan saldo secara otomatis setelah input data transaksi harian dilakukan.

c) Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap transaksi tercatat dalam sistem dan dapat dilacak kembali oleh pejabat berwenang maupun auditor. Ini memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta meminimalisir potensi kecurangan atau manipulasi.

d) Mendukung Reformasi Birokrasi dan SPBE

Penerapan sistem digital mendukung visi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan modern.

e) Kemudahan Akses dan Fleksibilitas

Sebagian besar sistem (misalnya CMS dan e-Katalog LKPP) dapat diakses secara daring melalui komputer/laptop tanpa harus datang ke lokasi fisik, sehingga memberi fleksibilitas kerja bagi pegawai.

2. Kekurangan atau Kendala yang Dihadapi

a) Ketergantungan pada Jaringan Internet

Karena hampir semua aplikasi berbasis online, maka koneksi internet menjadi kebutuhan utama. Ketika jaringan lambat atau terputus, seluruh proses pekerjaan akan terhambat.

b) Kemampuan SDM yang Belum Merata

Tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem teknologi keuangan. Pegawai senior sering kali kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur baru tanpa pelatihan yang memadai.

c) Belum Terintegrasinya Seluruh Sistem

Beberapa sistem masih berjalan secara terpisah (misalnya antara SIPKD dan SIMDA), sehingga data harus dimasukkan lebih dari sekali. Ini menimbulkan beban kerja tambahan dan risiko duplikasi input.

d) Keterbatasan Infrastruktur Perangkat Keras

Di beberapa ruangan kerja, fasilitas komputer dan printer masih terbatas, menyebabkan antrian dalam proses input data dan cetak dokumen.

Tabel 4. 5. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Teknologi Keuangan

No	Aspek	Kelebihan	Kekurangan
1	Waktu	Proses pencairan dan pelaporan lebih cepat	Terhambat saat jaringan internet tidak stabil
2	Tenaga Kerja	Beban administrasi berkurang karena otomatisasi	Pegawai yang belum familiar membutuhkan pendampingan
3	Akurasi dan Data	Kesalahan input berkurang, validasi otomatis	Harus input ganda jika sistem belum terintegrasi
4	Biaya Operasional	Mengurangi biaya ATK dan transportasi	Keterbatasan perangkat keras di beberapa bagian
5	Akses dan Mobilitas	Dapat diakses dari kantor tanpa perlu datang ke bank atau BPKAD	Ketergantungan pada aplikasi luar (CMS, e-Katalog)

Sumber: Hasil Observasi dan Dokumentasi, 2024

Beberapa sistem, seperti CMS Bank Nagari atau e-Katalog, dikelola oleh pihak eksternal. Saat terjadi kendala teknis atau pemeliharaan sistem, pihak OPD tidak bisa melakukan intervensi langsung.

4.6 Keterkaitan dengan Teori

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, penerapan berbagai sistem teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang terbukti berhubungan erat dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam Bab II.

a) **Keterkaitan dengan Teori Teknologi Keuangan (Financial Technology)**

Seperti dijelaskan oleh **Schueffel (2016)** dan **Otoritas Jasa Keuangan (2022)**, *financial technology* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan. Penerapan **SP2D Online**, **CMS Bank Nagari**, **SIPKD**, dan **e-Katalog LKPP** merupakan bentuk nyata implementasi fintech dalam sektor publik seluruh sistem ini terbukti mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi, serta mengurangi biaya operasional, sesuai dengan prinsip utama teknologi keuangan yang menekankan efisiensi dan efektivitas proses.

b) **Keterkaitan dengan Teori Efisiensi Operasional.**

Menurut **Siagian (2018)** dan **Mulyadi (2020)**, efisiensi operasional diukur dari kemampuan organisasi untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal. Berdasarkan hasil observasi, penerapan sistem digital seperti SP2D Online dan CMS Bank Nagari mampu memangkas waktu kerja dari beberapa hari menjadi hanya beberapa jam. Selain itu, SIPKD dan SIMDA meminimalkan kesalahan penginputan data, sedangkan e-Katalog LKPP mempercepat pengadaan barang/jasa hingga 70%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fintech di Dinas Pariwisata Kota Padang telah berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya waktu, tenaga, dan biaya, sejalan dengan teori efisiensi operasional.

c) **Keterkaitan dengan Teori Sistem Informasi Manajemen Keuangan**

Jogiyanto (2017)

menyatakan bahwa sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan organisasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa SIPKD dan SIMDA membantu bagian keuangan Dinas Pariwisata mengakses data real time terkait anggaran, realisasi, dan saldo kas. Dengan demikian, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat karena data tersedia setiap saat. Hal ini mendukung teori bahwa sistem informasi yang baik meningkatkan efisiensi serta kualitas keputusan keuangan.

d) **Keterkaitan dengan Teori Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik**

Menurut **Laudon & Laudon (2018)**, transparansi keuangan dapat tercapai apabila sistem informasi dapat mencatat dan menelusuri setiap transaksi secara otomatis. Penerapan SP2D Online, CMS, dan e-Katalog LKPP di Dinas Pariwisata Kota Padang menciptakan jejak digital yang lengkap sehingga memudahkan proses audit dan pertanggungjawaban keuangan.

Seluruh transaksi kini dapat dilacak secara daring, mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah.

e) **Keterkaitan dengan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah.**

Penerapan seluruh sistem tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini mendorong setiap pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem keuangan digital seperti SIPKD dan SP2D *Online* dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dinas Pariwisata Kota Padang merupakan salah satu instansi yang telah berhasil menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten.

Keterkaitan teori di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang tidak hanya sejalan dengan teori akademik, tetapi juga dengan kebijakan nasional mengenai digitalisasi pemerintahan. Setiap sistem yang diterapkan baik SP2D *Online*, CMS Bank Nagari, SIPKD, SIMDA Keuangan, maupun e-Katalog LKPP telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan penulis di Dinas Pariwisata Kota Padang, khususnya pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kegiatan magang dilaksanakan selama dua bulan dan berfokus pada bidang administrasi, pengelolaan surat, serta pengamatan terhadap penggunaan teknologi keuangan dalam kegiatan operasional.

Dari hasil pengamatan dan keterlibatan langsung dalam pekerjaan kantor, penulis menemukan bahwa Dinas Pariwisata Kota Padang telah menerapkan beberapa sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung kelancaran tugas, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Beberapa sistem tersebut di antaranya:

- a. **SIMDA Keuangan** yang digunakan untuk perencanaan dan pelaporan anggaran.
- b. **SIPKD** untuk pengelolaan transaksi dan pencatatan keuangan daerah.
- c. **SP2D Online** untuk pencairan dana dari kas daerah.
- d. **CMS (Cash Management System)** Bank Nagari untuk transaksi dan pemantauan saldo rekening secara real time.
- e. **e-Katalog LKPP** untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Penerapan teknologi keuangan tersebut berdampak positif terhadap efisiensi operasional Dinas Pariwisata Kota Padang. Proses administrasi dan

keuangan yang sebelumnya memakan waktu dan rentan kesalahan kini menjadi lebih cepat, tertib, dan transparan. Surat menyurat pun didukung oleh sistem komputerisasi, sehingga dokumen dapat diarsipkan secara digital.

Namun, implementasi teknologi keuangan juga menghadapi beberapa kendala. Tidak semua pegawai menguasai sistem yang digunakan, dan terkadang jaringan internet tidak stabil, yang menyebabkan gangguan dalam proses input data. Selain itu, sebagian kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi kerja dan transparansi, meskipun masih memerlukan peningkatan dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil magang dan pengamatan langsung terhadap penggunaan teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelatihan Pegawai Secara Berkala

Diperlukan pelatihan dan pembinaan terhadap pegawai yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, agar mampu menjalankan aplikasi seperti SIMDA, SIPKD, CMS, dan e-Katalog secara mandiri.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Fasilitas penunjang seperti komputer, printer, dan jaringan internet perlu diperbarui atau ditingkatkan agar penggunaan teknologi dapat berjalan lancar.

3. Integrasi Sistem Digital Secara Menyeluruh.

Perlu adanya peralihan bertahap dari sistem manual ke digital pada seluruh aspek administrasi dan keuangan, sehingga efisiensi dan akurasi kerja dapat semakin meningkat.

4. Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem.

Dinas sebaiknya melakukan evaluasi secara rutin terhadap aplikasi yang digunakan, baik dari segi manfaat, kendala, maupun kebutuhan pembaruan, agar dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Dengan terlaksananya saran tersebut, diharapkan penerapan teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang dapat semakin optimal dan mampu menunjang kinerja organisasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). *FinTech and RegTech: Impact on Regulators and Banks*. *Journal of Banking Regulation*, 19(4), 1–14.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewi, M. S. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 55–67.
- Fitzsimmons, J. A., & Fitzsimmons, M. J. (2011). *Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology* (Edisi ke-7). New York: McGraw-Hill Education.
- Handoko, T. Hani. (2019). *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Haris, M. (2023). *Penggunaan Cash Management System (CMS) Bank Nagari dalam Efisiensi Transaksi Pemerintah Daerah*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Sistem Informasi Manajemen: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: Kominfo RI.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 15th Edition. New York: Pearson.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2023). *Pedoman Penggunaan e-Katalog Nasional*. Jakarta: LKPP RI.
- Mulyadi. (2020). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Tahunan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia*. Jakarta: OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Putri, R., & Rahmawati, D. (2022). *Penerapan SIPKD di Pemerintah Kabupaten Agam terhadap Efektivitas Laporan Keuangan*. Bukittinggi: Universitas Negeri Padang.

PwC Indonesia. (2021). *The Future of FinTech in Indonesia: Digital Transformation and Public Sector Efficiency*. Jakarta: PricewaterhouseCoopers Indonesia.

Rahmawati, A. (2021). *Digitalisasi Keuangan Publik: Analisis Efisiensi Melalui Penerapan Sistem SIMDA Keuangan*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(3), 112–123.

Schueffel, P. (2016). *Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech*. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32–54.

Siagian, S. P. (2018). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siregar, R., & Nurhayati, E. (2021). *Pengaruh Penerapan SIMDA terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 45–53.

Stevenson, W. J. (2018). *Operations Management* (13th Edition). New York: McGraw-Hill Education.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wulandari, N. (2022). *Implementasi SP2D Online terhadap Efisiensi Pencairan Dana di Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Yuliana, R., & Pratama, D. (2020). *Efektivitas Penerapan Teknologi Finansial terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 70–85.